

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan otonomi mereka sendiri. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi wilayah besar dan kecil, serta bentuk dan susunan pemerintahannya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 12. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kemudian berfungsi sebagai dasar untuk pemerintahan daerah dan mencakup pemilihan kepala daerah dari tingkat gubernur hingga pada tingkat desa.

Pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal merupakan hal yang mendasar jika sebuah negara menerapkan demokrasi secara keseluruhan, dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu pada pemerintahan tingkat desa, sangat penting untuk menerapkan demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memungkinkan pemerintah Desa dengan bantuan perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UU Desa (Rahmat Taufiq, 2020).

Pemilihan umum, yang ditetapkan setiap lima tahun dan disebut sebagai acara pesta demokrasi oleh mayoritas orang, sangat menarik perhatian semua kalangan masyarakat. Pemilihan umum di daerah pedesaan, seperti pemilihan Kepala Desa selalu membawa dinamika kontestasi bahkan konflik tersendiri selama pelaksanaannya. Pemilihan kepala desa adalah acara yang sangat penting karena akan menentukan masa depan desa; maju atau tidaknya desa dapat dilihat dari terpilihnya calon kepala desa. Kepala desa mempunyai hak dan kewajiban untuk memimpin pemerintahan desa, dan mereka menetapkan berbagai kebijakan untuk masyarakat (Falah & Fauzi, 2021).

Pada pelaksanaannya, Pilkades merupakan suatu sistem yang digunakan dalam tataran pemerintahan sebagai penerapan aturan demokrasi. Secara tidak langsung, Pilkades menjadikan masyarakat ikut andil dalam mensukseskan dan menjadi bagian terpenting dalam suatu demokrasi terpimpin. Selama ini dalam tataran pemerintahan yang paling bawah, Pilkades telah menjadi subjek diskusi yang menarik untuk diangkat sebagai fenomena yang menarik. Hal ini terjadi karena

Pilkades adalah representasi bagaimana demokrasi itu dicoba diterapkan. Pada sisi lain, Pilkades sebagai sarana sirkulasi elit dan penyebaran kekuasaan pada tingkat lokal (Faisal, 2018).

Pilkades berfungsi sebagai alat untuk membangun pemerintahan modern dan demokratis (Wance & Ibrahim, 2019). Namun, dalam setiap proses Pilkades, ada persaingan politik atau kontestasi untuk memenangkan Pilkades. Calon Kepala Desa atau peserta dalam kontestasi ini akan mempengaruhi masyarakat untuk memenangkan Pilkades, terkadang dengan cara yang tidak pantas (Febriyanti, 2023).

Mengutip dari situs web resmi Pemerintah Kabupaten Klaten, Pelaksanaan Pilkades serentak gelombang II yang melibatkan 269 desa di Kabupaten Klaten. Desa Krakitan termasuk Desa yang mengikuti Pilkades gelombang ke II yang diselenggarakan pada 13 Maret 2019 bahkan kontestasi politik juga terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Krakitan, terjadi persaingan dalam kampanye pemilihan Kepala Desa yang bisa dibilang sangat sengit. Sebelum Pilkades Krakitan berlangsung pada tanggal 13 Maret 2019, orang sering memprediksi siapa yang akan menang dan membandingkan strategi kemenangan yang akan digunakan oleh masing-masing kandidat.

Seiring dengan hal ini, tidak jarang terjadi konflik dan kericuhan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkades. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkades terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik Pilkades yang diwarnai beragam permasalahan yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakat dalam penyelenggaraan kontestasi Pilkades. Situasi seperti ini terjadi di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten di dalam mencari perhatian dan mengambil hati masyarakat guna memenangkan dan mendapatkan jabatan sebagai Kepala Desa.

Dalam Pemilihan Kepala Desa Krakitan diikuti oleh empat kandidat calon kepala desa, yang keseluruhannya ialah laki-laki. Berikut ini merupakan tabel daftar nama kandidat dalam Pilkades Krakitan.

Tabel 1. Nama Kandidat

No	NAMA	PENDIDIKAN
1	ARI WIBOWO	SMA
2	NURDIN S.E	S1
3	WIRATNO	SMA
4	DRS. SUNUDI	S1

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, setiap kandidat calon Kepala Desa melakukan kampanye mereka sendiri dalam pemilihan Kepala Desa. Bahkan setiap kandidat memiliki cara unik untuk melakukan kampanye mereka. Salah satu bentuk kontestasi yang digunakan oleh setiap calon kandidat yakni pencitraan diri, seperti yang dilakukan oleh kandidat nomor 2 Nurdin S.E, yang juga merupakan petahana dalam pemilihan ini melakukan pendekatan kepada masyarakat agar memilihnya kembali karena dengan latar belakang menjadi Kepala Desa Krakitan dua kali periode. Kemudian para kandidat menggunakan baliho atau banner yang dipasang di setiap dusun dengan foto serta visi dan misi masing-masing kandidat. Semua calon Kepala Desa Krakitan memiliki isu-isu politik atau politik identitas tersendiri.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yang terletak di Desa Krakitan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian ini adalah dilihat dari rentang waktunya sehingga memudahkan peneliti mencari data dipilihlah Desa Krakitan yang belum lama ini melangsungkan Pilkades, yaitu pada tanggal 13 Maret 2019. Setiap kandidat memiliki strategi unik untuk memenangkan Pilkades dan mendapatkan perhatian masyarakat. Dalam Pilkades Krakitan, kemudian terjadi konflik antar tim yang menang karena konflik yang sudah terbuka membuat peneliti ingin melakukan penelitian di Desa tersebut. Peneliti juga menemukan narasumber yang tepat untuk data penelitian sehingga dapat memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan berdasarkan pengamatan mereka. Situasi seperti ini mendorong para peneliti untuk melakukan analisis dan penyelidikan lebih lanjut tentang "Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Tahun 2019".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kontestasi politik yang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Krakitan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana kontestasi politik yang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) di Desa Krakitan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan sebuah fenomena yang dapat diteliti secara ilmiah menggunakan metode teori politik. Dengan demikian, ilmu analisis pendidikan, terutama di bidang sosial politik, dapat ditingkatkan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peneliti untuk berpikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang ada disekitar, dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dan dipelajari selama proses perkuliahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk output karya ilmiah ini.

Dalam penelitian ini juga diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang fenomena Pilkada secara akademisi atau teoritis yang bermanfaat bagi masyarakat luas (kota dan desa), khususnya bagi masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi pelajaran berharga.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti berusaha untuk menemukan berbagai karya ilmiah, baik jurnal maupun skripsi, yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya berguna untuk mengetahui metode dan tolok ukur hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai pedoman untuk melihat berbagai konsep kasus yang serupa saat melakukan penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini tercantum di bawah ini:

a. Kontestasi Politik Lokal

Menurut penelitian (Febriyanti, 2023) tentang Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Gaya Baru VIII di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, ada persaingan dan kontestasi yang tidak dapat dihindari selama pemilihan kepala desa. Pilkada biasanya berfokus pada identitas sosial seperti kereligiusan, pangkat, dan jabatan. Kontestasi lain seperti memasang banner dan menggunakan media sosial dalam berkampanye.

Penelitian Ambo Upe tentang Kontestasi Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis masih berlangsung. Penelitian ini membahas politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa, khususnya dalam konteks masyarakat Bugis. Pilkada Tosora 2020 menunjukkan bahwa keterpilihan Asri Prasak dari appang to wajo-wajo dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan kerabat. Selanjutnya, kekerabatan keluarga memengaruhi pemilihan calon dan memengaruhi posisi jabatan dalam pemerintahan. Kepala desa terpilih memprioritaskan orang-orang dalam keluarganya daripada orang-orang luar keluarganya. Metode pengisian jabatan seperti ini akan melanggar prinsip demokrasi desa.

(Rohmawati, 2013) dalam penelitiannya mengenai Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan antar aktor dalam pemilihan Kepala

Desa Masin dipengaruhi oleh faktor pertemanan, persaudaraan, dan ketetanggaan. Kemudian, proses pemilihan Kepala Desa Masin ditinjau dari perselisihan dan persaingan yang terjadi selama pemilihan, yang menunjukkan ketidakdemokrasian karena ada indikasi politik uang dan penggunaan kekuatan supranatural.

Penelitian yang dilakukan oleh (F. A. Lestari, 2021) dengan judul "Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala desa di desa Gareccing dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatannya, yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sinjai dan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Gareccing pada tahun 2016 lalu sangat diterima oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kedua pasangan calon kepala desa tidak melakukan kecurangan atau kecurangan finansial politik, dan tidak ada tekanan politik atau intimidasi.

Penelitian (Astuti et al., 2019) mengenai Kontestasi Pasangan Suami Istri dalam Pilkades, penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena pasangan suami istri sebagai kontestan dalam Pilkades Kabupaten Demak tahun 2016 yakni terjadinya praktek subordinasi perempuan karena keputusan menetapkan istri sebagai calon pendamping merupakan bentuk kepatuhan istri atas kemauan dan perintah suami. Kemudian terkait dengan dampak yang timbul dari fenomena kontestasi pasangan suami istri dalam Pilkades karena dapat merusak sendi-sendi demokrasi desa. Pernyataan tersebut merujuk pada hilangnya prinsip kompetisi dalam pelaksanaan Pilkades.

Dalam penelitian (Rizki et al., 2022) tentang Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Cambai Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan Tahun 2021, dia menunjukkan bahwa konflik dan persaingan yang tidak demokratis memengaruhi dinamika pemilihan kepala desa Cambai. Ini terjadi karena ada indikasi politik uang dan penggunaan kekuatan lainnya. Namun, masyarakat Desa Cambai menganggap ini sebagai hal yang wajar dalam setiap pemilihan kepala desa dan tidak melanggar. Sebaliknya, hubungan antar aktor yang berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa Cambai adalah hubungan karena kekerabatan, yang dipengaruhi oleh faktor seperti pertemanan, persaudaraan, dan ketetanggaan.

Dalam penelitian (Muchamad Rinaldi & Sutopo, 2023) mengenai Analisis Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dari Perspektif Demokrasi Modern menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala desa di Desa Drajat berjalan lancar dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan. Faktor yang memengaruhi kemenangan calon kepala desa adalah jaringan kekeluargaan dan kekuatan yang tersebar di Desa Drajat serta pemanfaatan kekuatan mereka.

b. Dampak Kontestasi Politik Lokal

Menurut penelitian (W. Lestari, 2022) tentang Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 Terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, proses pemilihan di Desa Tandung berjalan lancar karena semua tim mengikuti aturan pemilihan dan konflik sosial berdampak pada hubungan keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat setempat. Pemilihan Desa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, seperti hubungan antara orang-orang dan kemajuan mereka sendiri. Untuk menyelesaikan konflik, masyarakat Desa Tandung kembali membangun hubungan silaturahmi dengan bersosialisasi, musyawarah, berterima kasih, dan memahami satu sama lain.

Dalam penelitian mereka tentang Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Eksistensi Nilai Budaya Basanohi pada Desa Waiboga Kecamatan Sulabessi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Andiyana Sadipun, Louisa M Metekoh, dan Remon Bakker (2022) menemukan bahwa pemilihan kepala desa berdampak pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan masyarakat di desa Waiboga. Hal ini terlihat pada pemilihan kepala desa, di mana orang membentuk kelompok kecil dengan pilihan yang berbeda, yang menyebabkan konflik antar komunitas. Dalam hal pemilihan kepala desa yang berdampak pada nilai-nilai budaya Basanohi, para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di desa harus melakukan upaya dan usaha untuk mendorong masyarakat dan generasi muda untuk memahami dampak pemilihan terhadap budaya.

Studi (Fajriani & Tenripadang, 2022) tentang Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasa Syar'iyah menunjukkan bahwa sistem pemilihan kepala desa secara langsung telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum pemilihan presiden secara langsung. Proses demokratisasi di level pemerintahan paling bawah ini selalu diwarnai oleh berbagai masalah yang muncul selama proses pemilihan. Kekerasan dapat terjadi karena kekecewaan pendukung calon yang kalah, yang dapat merusak ikatan keluarga yang khas masyarakat pedesaan. Proses pemilihan kepala desa merusak hubungan kekeluargaan, yang membutuhkan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa proses tersebut menguntungkan daripada menguntungkan.

Dari sepuluh penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, peneliti dapat mempelajari apa yang telah dikatakan oleh peneliti sebelumnya tentang konsep kontestasi dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini berfokus pada dua hal: pertama, bagaimana kontestasi politik terjadi dalam pemilihan kepala desa, dan kedua, apa yang terjadi setelah kontestasi politik.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti (Yaniwati, 2018). Menurut Arikunto “Kerangka teori menjelaskan tentang variabel dan masalah utama dalam penelitian”. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar untuk diskusi berikutnya (Suharsimi, 2011). Dengan demikian, kerangka teoretis dibangun untuk memastikan bahwa penelitian dapat diterima.

1.6.1 Demokrasi

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Pemerintahan demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Demokrasi pertamanya merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi bahkan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan rakyat oleh, untuk, dan bersama rakyat dalam pengertian yang lebih partisipatif. Artinya Rakyat pada dasarnya memiliki kekuasaan, dan merekalah yang menentukan, mengarahkan, dan menjalankan kehidupan negara.

Menurut Titik Triwulan Tutik dalam buku “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” bahwa “ Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata Yunani: "demos", yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat), dan "cretein", atau "cratos", yang berarti kekuasaan (kedaulatan)”. Oleh karena itu, demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana rakyat menjalankan pemerintahan (Titik, 2016).

Bila ditinjau dari terminologisnya, demokrasi yang sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli ialah :

1. Affan Gaffar, demokrasi memiliki dua definisi yaitu secara normatif, ialah bagaimana suatu negara harus menjalankan demokrasi dan empirik yaitu bagaimana demokrasi diterapkan dalam dunia politik nyata (Gaffar, 1999).
2. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana warga negara bertindak secara tidak langsung dan bekerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih untuk mengawasi pemerintah (Schmitter & Karl, 1991).
3. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu sistem organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan politik, di mana individu memiliki otoritas untuk memutuskan cara berperang atas suara rakyat (Schumpeter, 1994).
4. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik yang menentukan kebijakan umum oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif

oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik (Winarno, 2019).

5. Sidney Hook, bahwa demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana suara mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa menentukan keputusan pemerintah yang penting (Hook, 2002).

Joseph Schumpeter menyempitkan definisi demokrasi dengan mengatakan bahwa "demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara, dan itu berlangsung dalam pemimpin-pemimpin politik berikutnya". Rakyat adalah subjek sesungguhnya dari demokrasi, dan sebagai subjek, mereka akan memainkan peran mereka melalui berbagai alat yang tersedia. Dalam demokrasi ini, rakyat didorong untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan dan memiliki hak untuk dipilih dalam pemilihan umum (Schumpeter, 1994). Joseph A. Schumpeter menggambarkan demokrasi sebagai "perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat."

Untuk mencapai kesejahteraan, negara harus melewati sebuah proses yakni demokrasi. Kualitas demokrasi sebuah negara tidak ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan dilihat dari fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh faktor budaya negara tersebut. Kompromi adalah syarat utama yang menentukan bahwa sebuah negara menganut prinsip demokrasi karena demokrasi bergantung pada kenyataan bahwa tidak ada kompromi yang dapat menyatukan pendapat untuk menentukan tatanan negara.

Dengan demikian, demokrasi secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat dalam berbagai peristiwa, seperti pemilihan anggota DPR RI, presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD, DPRD, bahkan pemilihan kepala desa. Semakin banyak keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik yang berfokus pada kepentingan rakyat menunjukkan bahwa demokrasi di negara tersebut semakin baik.

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD dalam Rosidah (2018) menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa demokrasi dipilih sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di seluruh dunia telah menjadikan demokrasi sebagai dasar negara. Kedua, demokrasi sebagai dasar kenegaraan telah menentukan peran masyarakat dalam mengelola negara sebagai organisasi tertinggi. Ada tekanan pada peran dan fungsi warga masyarakat untuk menentukan sendiri nasib pemerintahan, sehingga mereka dapat mengatur semua yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Beranjak dari sistem tersebut, membentuk ketiga lembaga negara pemahaman kita tentang demokrasi selalu terdiri dari tiga kata kunci yang dikenal sebagai trias

politica. Teori trias politica menggambarkan bagaimana kekuasaan politik negara dibagi menjadi tiga bagian: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk tersebut, perlu diperhatikan bahwa ketiganya selalu saling bebas (independen) dan berada di posisi yang sama.

Agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances, mereka harus sejajar dan independen. Trias Politica ini akhirnya menjadi salah satu pilar demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat yang luas, bahkan di seluruh dunia. Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah pemerintah, yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, pengadilan, yang bertanggung jawab atas fungsi yudikatif, dan perwakilan rakyat, atau DPR, yang bertanggung jawab atas fungsi legislatif.

1.6.2 Kontestasi

Kontestasi sendiri dari kata dasar Kontes. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutnya artinya sebagai kata benda, yaitu perlombaan. Menurut Kamus Ocford tahun 2005, kontes adalah kata benda yang berarti peristiwa di mana orang mencapai supremasi. Dalam konteks penelitian ini, kontestasi didefinisikan sebagai suatu pertandingan atau perlombaan di mana orang bersaing untuk mendapatkan lebih banyak suara dalam pemilihan kepala desa.

Teori kontestasi dipelopori oleh Pierre Bourdieu yang membangun teori kontestasi dengan mendefinisikan dua unit analisis: "arena" dan "capital symbolic" (Bourdieu, 1996:169). Bourdieu merangkum konsep habitus dalam penjelasannya. Habitus adalah kebiasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu tidak dapat dipisahkan dari gagasan Bourdieu tentang arena (tanah).

Pada dasarnya, arena adalah tempat di mana orang-orang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dan mempengaruhi orang lain dalam perebutan kekuasaan. Selain itu, arena dapat dianggap sebagai tempat di mana setiap calon kepala desa bersaing untuk kekuasaan. Oleh karena itu, arena dapat didefinisikan sebagai ruang geografi, seperti area yang terdiri dari desa, kota, atau negara. Muara arena itu adalah tempat peristiwa terjadi untuk mencapai tujuan dominasi. Jika sebuah kontestasi terjadi di arena desa, objek analisis teori kontestasi dapat dipastikan.

Menurut teori kontestasi Charles Tilly dan Sidney Tarrow, *Contentious Politics* adalah masalah "*claiming*" atau tuntutan di mana subjek (pembuat klaim) dan objek (penerima klaim) bersaing. Politik penuh konflik melibatkan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan satu sama lain. Untuk memperkuat kepentingan masing-masing, para aktor menggabungkan jalur institusional (Schmitter & Karl, 1991). Namun, Garry Van Klinken mengatakan bahwa politik seteru adalah politik yang banyak berbicara tentang hal-hal yang menyebabkan konflik di luar batas politik formal dan kadang-kadang diwarnai dengan kekerasan (Klinken, 2007) . Selain itu, Charles Tilly menyatakan bahwa politik contentious adalah situasi di mana aktor

mengklaim tindakan atau kepentingan orang lain, dengan pemerintah berperan sebagai tujuan, inisiator, atau pihak ketiga (Tioceccar, 2015).

Sidney Tarrow, Charles Tilly, dan Doug Kagan berfokus pada hubungan konflik yang terjadi di antara para aktor yang terlibat dalam perseteruan, karena mereka masing-masing mengklaim rasionalitas kebenaran akan latar belakang maupun tujuan Tindakan menurut perspektif masing-masing (Charles Tilly, 2015). Pada saat yang sama, pemerintah atau rezim yang berkuasa bertindak sebagai target utama para pihak yang bertikai. Pemerintah juga dapat dianggap sebagai pihak ketiga yang mengatur eskalasi konflik atau sebagai pemrakarsa atau pencipta klaim kebenaran yang menyebabkan konflik. Gerakan sosial, pemogokan, dan revolusi politik adalah beberapa contoh nyata dari konflik perseteruan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan yang dikonsesikan untuk membentuk wilayah kekuasaan politik didasarkan pada garis etnis, kesamaan, kepercayaan, atau, secara lebih umum, persamaan identitas keyakinan-keyakinan inti (*core of beliefs*) masing-masing kelompok. Ini adalah alasan utama penggunaan teori perseteruan politik.

Dalam teori kontestasinya, Charles Tilly dan Sidney Tarrow Contentious Politics adalah persoalan "claiming", atau tuntutan, di mana ada subjek (pembuat klaim) dan objek (penerima klaim). Dalam kontestasi politik, para aktor berkompetisi untuk kepentingannya. Setiap calon kepala desa dimaksudkan di sini. Untuk memperkuat kepentingan masing-masing, para aktor menggabungkan jalur institusional dan ekstrainstitusional. Dalam proses kontestasi politik ini, pendapat sang aktor lebih penting dari sang aktor bukan dari perspektif birokrasi.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut :

- a. **Kontestasi Politik Lokal** merupakan arena pertarungan yang melibatkan elit-elit lokal yang sejatinya merupakan pertarungan modal. Semakin berpengaruh modal yang dimiliki seseorang elit atau sekelompok elit maka semakin besar peluang untuk memperoleh kemenangan.
- b. **Polarisasi/Hubungan** ialah kondisi keterbelahan masyarakat dalam menyikapi is-isu politik maupun isu lainnya. Umumnya terjadi karena perubahan sosiokultural dalam masyarakat.
- c. **Pemilihan Kepala Desa** adalah proses demokrasi di mana orang-orang di tingkat desa memilih pemimpin secara langsung. Kepala desa akan dipilih oleh calon yang memenuhi syarat dan menerima suara terbanyak. Kepala desa menjabat selama enam tahun sejak pelantikan dan tidak boleh menjabat lebih dari tiga kali berturut-turut.

- d. Pemerintah Desa** adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kegiatan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa melalui badan atau organisasi yang dimilikinya.

1.8 Definisi Operasional

Adapun Definisi Operasional yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kontestasi
 - a. Persaingan
 - b. Partisipasi
 - c. Perebutan Kekuasaan
 - d. Modalitas

1.9 Kerangka Berfikir

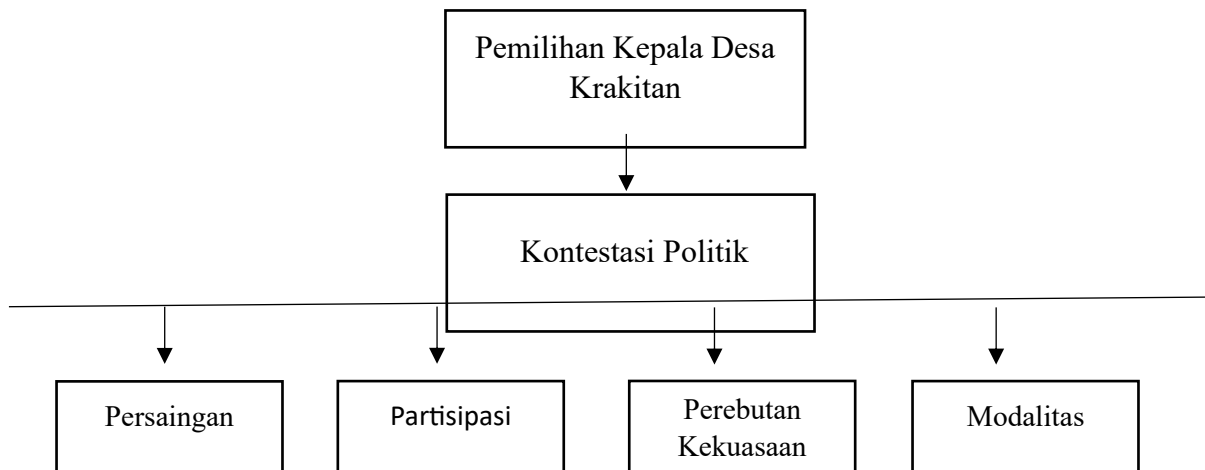
Kerangka berfikir terdiri dari bagan atau alur kerja yang digunakan untuk memecah masalah penelitian dan dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Kerangka fikir membantu orang memahami alur pemikiran dengan cepat, mudah, dan jelas. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Untuk menerapkan demokrasi di tingkat bawah pemerintahan Indonesia, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung. Dalam Pilkades, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memilih sesuai dengan keyakinan mereka sendiri tanpa dipaksa oleh pihak lain. Nantinya, Selama kampanye, beberapa calon kepala desa akan bersaing untuk mendapatkan atau merebut suara warga masyarakat yang ada dalam suatu desa tersebut.

Desa Krakitan yang terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan belum lama ini telah melaksanakan ini telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa gelombang ke II. Tentunya, dari setiap masing-masing calon kepala desa ingin mendapatkan suara terbanyak dalam persaingan ini. Oleh karena itu, setiap calon kepala desa akan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan dukungan atau mendapatkan suara dari semua penduduk desa. Setiap calon kepala desa memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan membentuk tim kemenangan atau tim sukses, yang terdiri dari beberapa orang dengan tugas masing-masing.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mempelajari secara menyeluruh tentang bagaimana kontestasi terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Krakitan. Kemudian dalam penelitian ini juga ingin mengetahui indicator yang terjadi dalam proses kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Krakitan. Berikut ini merupakan gambaran atau skema berfikir dalam penelitian ini :

Bagan 1. Skema Berfikir



1.10 Metode Penelitian

Pada sub bab ini memaparkan terkait metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Adapun sub-sub bab yang dipaparkan dalam sub bab adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, Teknik pengumpulan data dan Teknik Analisa data. Maleong mengatakan bahwa metode penelitian dapat didefinisikan sebagai ilmiah dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks ilmiah dengan mengutamakan proses komunikasi yang intim antara peneliti dan subjek penelitian (Moloeong, 2017).

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lainnya, secara menyeluruh (Moleong, 2006). Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain.

Penelitian yang berjudul Tentang Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Tahun 2019 merupakan suatu objek yang baiknya menggunakan Metode Kualitatif. Dengan metode pengumpulan data penelitian seperti wawancara dan dokumentasi, kita dapat menghasilkan hasil yang dapat dipercaya yang berdasarkan fakta. Dengan begitu diharapkan dapat mengetahui Bagaimana Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Tahun 2019.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena melihat gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat setelah adanya kontestasi dalam kontestasi yang terjadi di Desa Krakitan. Gejala-gejala sosial yang dimaksud timbul sebagai persoalan baru yang mampu mempengaruhi masyarakat. Seperti yang dijelaskan bahwa terjadi hubungan sosial yang sebelumnya tidak pernah terjadi, baik antar individu maupun kelompok. Peneliti melihat ini sebagai fenomena sosial yang menarik karena ada "konflik" di antara warga Desa Krakitan bahkan setelah Pilkades dilaksanakan.

1.10.3 Jenis data

Penulis menggunakan 2 jenis data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Yuniati, 2021). Adapun data primer terdiri dari jawaban informan atas pertanyaan dan pendapat yang dianggap cukup dan relevan dengan subjek penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku terkait, arsip mengenai daftar pemilih tetap, penggunaan surat suara, klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah, jurnal, peraturan/undang-undang, media masa, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono teknik pengumpulan data pada metode kualitatif secara umum terdapat empat macam, diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi Click or tap here to enter text. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan yang bersangkutan pada kontestasi yang terjadi di Desa Krakitan.

1.10.4.1 Wawancara Mendalam

Menurut Nazir bahwa wawancara adalah proses mendapatkan informasi melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau penanya dengan yang sedang diwawancarai, informan (Nazir, 2003). Pada penelitian ini digunakan wawancara mendalam dengan tim sukses keempat kandidat calon Kepala Desa. Peneliti menggunakan telepon seluler, kamera, buku catatan, dan pedoman wawancara untuk merekam suara selama wawancara mendalam. Wawancara (interviewer guide), berisi tentang pokok-pokok pertanyaan yang telah direncanakan dan dianggap penting untuk mendapatkan data penelitian dari masyarakat yang terkena dampak adanya kontestasi pemilihan kepala desa, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya tentang kontestasi politik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Krakitan.

Selain itu, metode wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini, dengan harapan mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan . Oleh karena itu, pedoman wawancara semi terstruktur harus terdiri dari sejumlah pertanyaan yang relevan. Namun, nantinya pertanyaan juga bisa dikembangkan ketika berada di lapangan. Sehingga dengan demikian akan diperoleh data yang lengkap untuk menganalisis permasalahan yang diteliti

Dalam hal ini, narasumber yang akan diwawancarai adalah tim sukses dari masing-masing calon kepala desa yang berjumlah 11 orang. Wawancara ini diharapkan memberikan data yang mendalam mengenai kontestasi politik dalam pemilihan kepala desa. Adapun Narasumber dari penelitian ini yakni :

1. Bapak Agus Raharjo : Timses Bapak Ari Wibowo (Bugel)
2. Bapak Hadi Sadikin : Timses Bapak Ari Wibowo (Bugel)
3. Bapak Sayuti Wibowo : Timses Bapak Nurdin (Jetis)
4. Bapak Basuki : Timses Bapak Nurdin (Duwet)
5. Bapak Triwono : Timses Bapak Nurdin (Bregosan)
6. Bapak Siswanto : Timses Bapak Wiratno (Duwet)
7. Bapak Wagiyo : Timses Bapak Wiratno (Bregosan)
8. Bapak Kuat Samirin : Timses Bapak Wiratno (Batilan)
9. Bapak Agus Cahyono : Timses Bapak Sunudi (Drajad)
10. Bapak Siswanto : Timses Bapak Sunudi (Tanjung sari)
11. Bapak Slamet Riyadi : Timses Bapak Sunudi (Mbelah)

1.10.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara melakukan pencatatan mengenai suatu peristiwa yang telah lalu dan hal-hal yang diinginkan. Dokumen yang dikumpulkan peneliti termasuk tulisan, data, laporan penelitian dan lainnya. Dokumen yang dikumpulkan selama penelitian ini termasuk foto, catatan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa Krakitan, dan lainnya.

1.10.5 Teknik Analisa Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memecahkan masalahnya, analisis data adalah bagian penting dari penelitian. Mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan lain di lapangan disebut analisis data. Sebelum memulai penelitian di lapangan, selama penelitian di lapangan, dan setelah selesai penelitian di lapangan, data dianalisis. Dalam penelitian kualitatif ini, data diolah dan dianalisis melalui pendekatan deskriptif analisis. Prosedur berikut digunakan untuk menganalisis data:

1.10.5.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah proses berfikir yang sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Ini adalah proses meringkas, mengurangi, memilih informasi yang penting, berfokus pada apa yang penting, mengidentifikasi tema dan pola, dan menghapus informasi yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2015). Oleh karena itu, data yang direduksi dari penelitian akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, ini akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tambahan dan memintanya jika diperlukan.

1.10.5.2 Penyajian Data

Penyajian data atau data display adalah menyajikan sekumpulan informasi yang telah disusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Data dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai referensi untuk tindakan yang ada. Analisis data sebelumnya telah dilakukan; namun, analisis ini masih dalam bentuk catatan dan belum disusun dalam bentuk laporan.

1.10.5.3 Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman (Aisyi, 2020). Kesimpulan awal yang diuraikan masih bersifat sementara dan tidak akan didukung jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut

menjadi kredibel. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap akhir dari metode analisis data kualitatif. Hasil penurunan data menunjukkan tujuan analisis.

